



POHON KINERJA

DISKOMINFO SAROLANGUN

TAHUN 2025

TUJUAN RPD

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, MENJUNJUNG TINGGI NILAI AGAMA, ADAT ISTIADAT DENGAN PELAYANAN PUBLIC YANG HANDAL

INDIKATOR TUJUAN

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN RPD

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR URUSAN PD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator Sasaran

- Predikat SAKIP.
- Target BB

Meningkatkan layanan Informasi Publik

Indikator Sasaran

- Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan
- Target 89,33%

Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD

Indikator Sasaran

- Persentase Perangkat Daerah yang Saling Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- Target 73%
- Persentase Pengelolaan SPBE.
- Target 62,50%

Meningkatnya kualitas data statistik sektoral & terintegrasi

Indikator Sasaran

- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- Target 70%
- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- Target 70%

Meningkatnya keamanan informasi daerah

Indikator Sasaran

- Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
- Target Tinggi

TUJUAN PD

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

INDIKATOR TUJUAN

KATEGORI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

INDEKS SPBE

TARGET

INFORMATIF

2,63

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program

Predikat SAKIP

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program

Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan

Program Aplikasi Informatika

Indikator Program

Persentase Pengelolaan SPBE

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program

Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

KEGIATAN

SUB KEGIATAN 1

| 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 1. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH | 1. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA. | 1. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah • Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Relasi Media • Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat • Pelayanan Informasi Publik • Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik • Pengelolaan Media Komunikasi Publik • Penyusunan Konten | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda. • Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi • Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. • Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota • Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Penyelenggaraan SPBE | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral • Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral • Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik • Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |

SUB KEGIATAN 2

2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

SUB KEGIATAN 3

3. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

SUB KEGIATAN 4

4. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

SUB KEGIATAN 5

5. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

SUB KEGIATAN 6

7. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SUB KEGIATAN 7

8. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BAROLANGUN



H. AHMAD NASRI, S.H.
NIP. 196711101997031004